



Tren Penegakan Hukum Dalam
Pemberantasan korupsi 2011

Dok.ICW2012

1

Tujuan



Sumber Data dan Metode

- Sumber data; Media massa, website Kejaksaan Agung, Website KPK, Rilis Kepolisian dan sumber informasi lainnya.
- Mengkompilasi semua data kasus korupsi di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia selama tahun 2011.
- Menganalisa data kompilasi secara kuantitatif berdasarkan beberapa parameter diantaranya sektor korupsi, wilayah, aktor, latar belakang aktor, serta kinerja penanganan perkara berdasarkan tahun terjadi dan tahun penanganan perkara.
- Keterbatasan dari metoda pencarian data diatas adalah tidak bisa mendeteksi seluruh kasus korupsi yang sedang ditangani oleh APH pada rentang monitoring, disamping belum terbukanya APH dalam mempublikasikan kepada publik semua kasus yang sedang mereka tangani.



3

Tren Pemberantasan Korupsi 2011

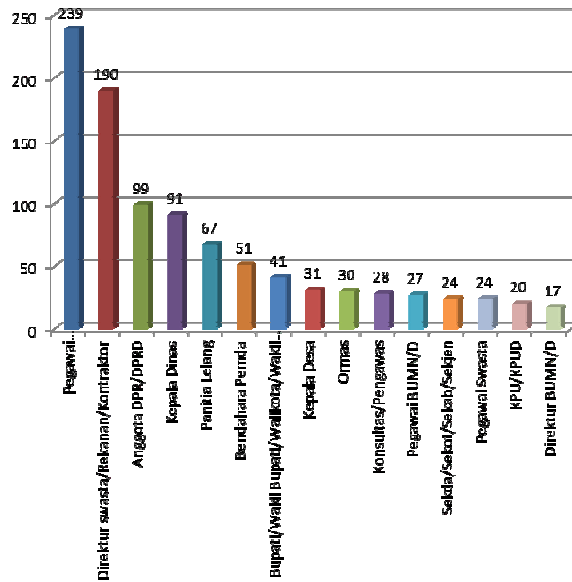
- Berdasarkan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi oleh APH selama tahun 2011, diketahui bahwa terdapat setidaknya 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1053 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2,169 Triliun.
- Jika dibandingkan dengan tren penegakan hukum tahun sebelumnya, terjadi penurunan angka meskipun tidak terlalu signifikan, dimana jumlah kasus korupsi yang pernah ditangani pada tahun 2010 mencapai 448 kasus dengan jumlah tersangka 1157 orang dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp. 3,7 triliun.

•(Dok-ICW2012)

4



15 Jabatan Terbesar Tersangka Kasus Korupsi



Ket : *Pegawai adalah PNS di lingkungan Pemda/Pemkot/Pemprov/PemPus
 *Direktur adalah Pimpinan (Komisaris/Direktur) Perusahaan Swasta



Sumber foto : www.okezone.com,
www.rakvatmerdekaonline.com

Latarbelakang Jabatan Pelaku Korupsi

- Dari 1053 orang. Dari jumlah diklasifikasikan menjadi sekitar 30 jenis jabatan. Namun ICW hanya menampilkan 15 besar
- Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang. Diikuti oleh direktur/ pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang serta anggota DPR/DPRD dengan jumlah 99 orang.
- Tingginya tersangka korupsi dengan latar belakang pegawai ini konsisten dengan tahun 2010 meskipun jumlahnya menurun (Tahun 2010 : 336 orang).

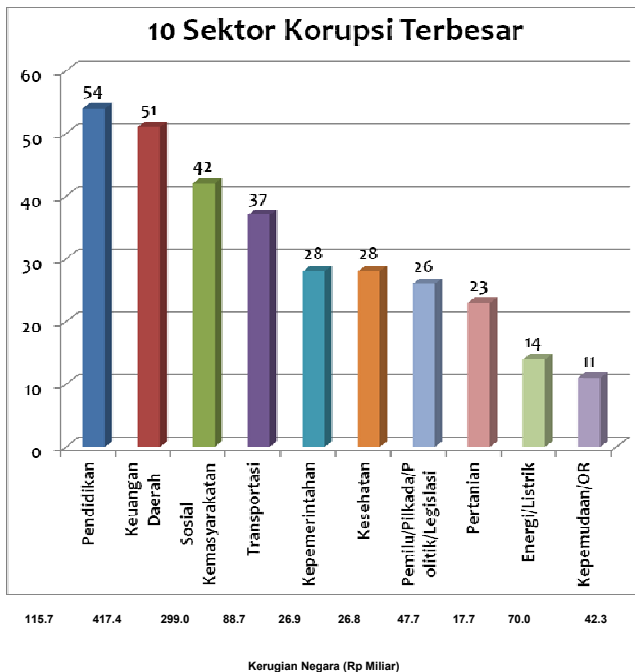


Fenomena pegawai dalam kategori menengah kebawah yang menjadi tersangka korupsi

- Mengkonfirmasi penelusuran PPAK tentang maraknya rekening mencurigakan PNS muda diberbagai daerah.
- Menunjukan kegagalan badan-badan pengawas internal pemerintah pusat/ daerah seperti Bawasda, Irjen dalam mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi.
- Terjadi peningkatan kuantitatif dalam 2 tahun terakhir, namun APH lebih banyak menjerat aktor menengah kebawah.
- Kebijakan remunerasi dalam kerangka reformasi birokrasi ternyata belum efektif mereduksi berbagai bentuk/ perilaku korup yang dilakukan para PNS.
- Sejalan dengan hasil audit BPK semester I 2011 yang menjelaskan bahwa praktek penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu terkait adanya belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran atau penggelembungan harga (mark up) yang dilakukan oleh para pegawai negeri dari berbagai level pemerintahan, baik pusat, propinsi maupun kabupaten.

7

10 Sektor Korupsi Terbesar



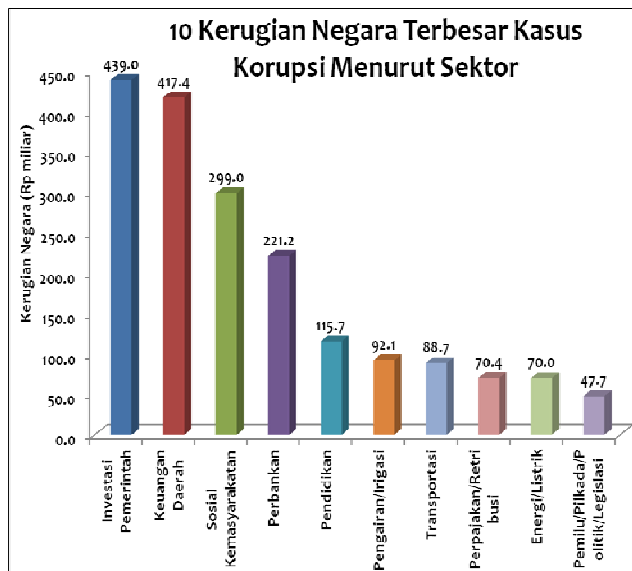
Sumber foto : www.antaraneews.com

8

Sektor korupsi

- Dari 436 kasus korupsi yang terpantau selama tahun 2011 ditemukan 10 sektor yang terbilang tinggi jumlah korupsinya.
- Tiga yang paling korup yaitu sektor pendidikan dengan 54 kasus, diikuti sektor keuangan daerah dengan 51 kasus dan sektor sosial kemasyarakatan dengan 42 kasus korupsi.
- Tingginya korupsi disektor pendidikan ini merupakan hal baru karena di tahun 2010, sektor korupsi yang paling tinggi adalah infrastruktur (85 kasus), diikuti sektor keuangan daerah (82 kasus) dan pendidikan (47 kasus).
- Sektor pendidikan yang paling tinggi angka kejadian korupsinya perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Keadaan ini patut diwaspadai apalagi sektor ini memperoleh porsi anggaran terbesar dari APBN. Oleh karena itu penting bagi jajaran Kemendiknas, Dinas-dinas pendidikan di daerah, BPK/BPKP serta aparat penegak hukum mengawasi dengan sungguh-sungguh penggunaan dan pertanggungjawaban anggarannya.
- untuk beberapa sektor strategis, belum ada kasus korupsi yang ditangani oleh APH. Sektor strategis tentu dapat dilihat dari sektor penerimaan negara, Seperti pajak dan sektor migas, serta lembaga negara yang paling tinggi mendapatkan alokasi anggaran dari negara (APBN), seperti Departemen Pertahanan maupun Departemen Kesehatan.

9



Dok-ICW2012

10

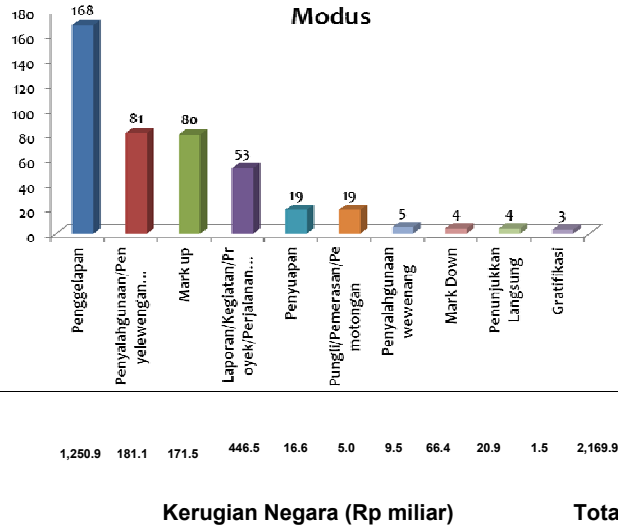
3 besar sektor yang paling rugikan negara

1. Sektor Investasi pemerintah, dimana potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 439 miliar.
2. Sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 417,4 miliar.
3. Sektor sosial kemasyarakatan, yaitu korupsi yang kasusnya yang berkaitan dengan yang dana-dana bantuan yang diperuntukan langsung kepada masyarakat sebesar Rp. 299 miliar.
4. korupsi dana bansos dan dana hibah terbilang konsisten terjadi hampir setiap tahun dengan latarbelakang aktor yang sangat lengkap yaitu eksekutif, legislatif, swasta maupun masyarakat (ormas).



11

Kerugian Negara Kasus Korupsi Menurut Modus



Dok-ICW2012

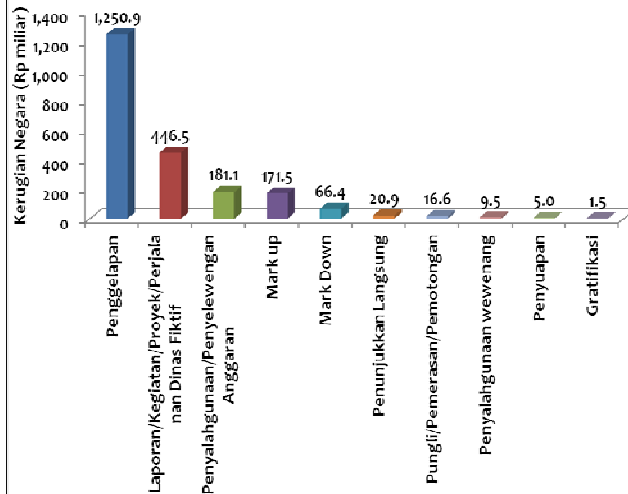
12

Modus korupsi sepanjang tahun 2011

1. Modus kasus korupsi yang muncul selama tahun 2011 sangat beragam
2. tiga besar modus korupsi yang paling sering muncul adalah ; penggelapan dengan 168 kasus, penyalahgunaan anggaran dengan 81 kasus dan modus pengelembungan biaya (Mark Up) sebanyak 80 kasus
3. adanya konsistensi antara tahun 2010 dan tahun 2011 dimana penggelapan menjadi modus yang paling sering muncul
4. *mark-up* dan penyalahgunaan anggaran yang bertukar peringkat. Untuk diketahui, pada tahun 2010, modus penggelapan terdapat 150 kasus, mark up sebesar 139 kasus dan penyalahgunaan anggaran sebesar 67 kasus.
5. Patut di apresiasi karena aparat penegak hukum di daerah sudah mulai menangani kasus-kasus bermodus suap diantaranya kasus suap tender proyek rumput laut di kabupaten toli-toli Sulawesi tengah (Polres) dan Suap terkait sengketa pajak PT DAM di Pengadilan Pajak Bandung, Jawa Barat (Kejaksaan).

13

Kerugian Negara Kasus Korupsi Menurut Modus



Dok-ICW2012

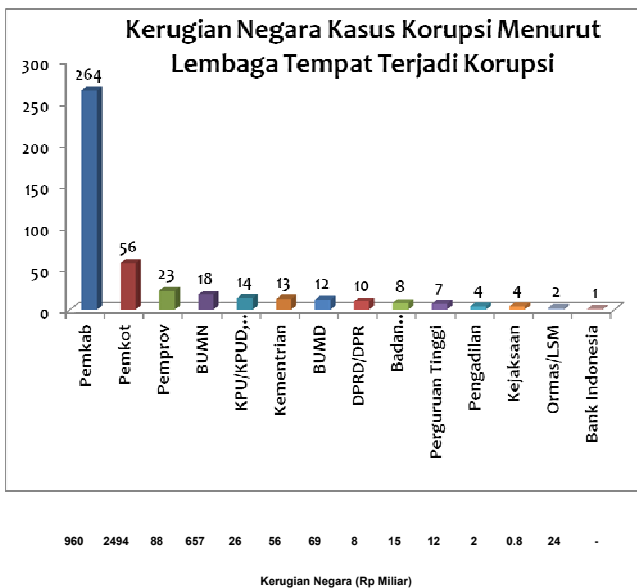
14

Modus yang menyebabkan kerugian negara paling besar

1. modus penggelapan paling besar menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.250,9 triliun.
2. Modus kegiatan/laporan/perjalanan dinas fiktif meskipun jumlahnya hanya 53 kasus ternyata berpotensi menimbulkan kerugian negara kedua terbesar selama tahun 2011 dengan besaran mencapai Rp. 446,5 miliar.
3. Modus penyalahgunaan anggaran yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 181,1 miliar.



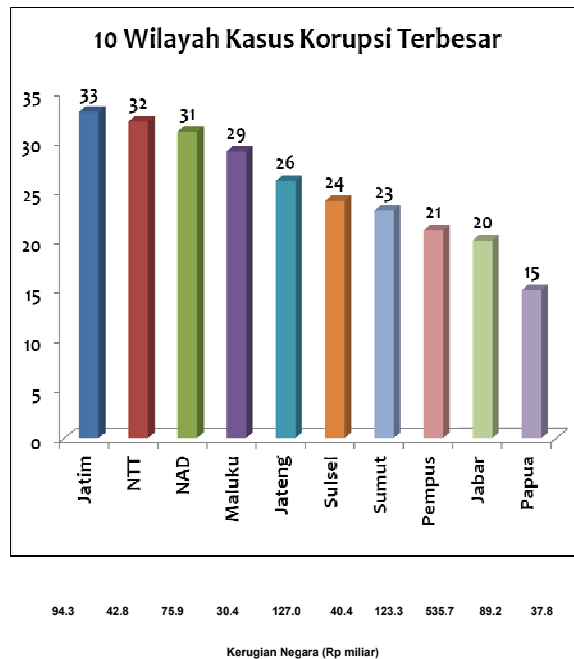
Kerugian Negara Kasus Korupsi Menurut Lembaga Tempat Terjadi Korupsi



Kerugian negara berdasarkan tempat terjadinya korupsi

- Selama tahun 2011, setidaknya terdapat 14 lembaga yang terdeteksi paling rawan korupsi.
- Dari 14 lembaga terdapat tiga lembaga yang paling rawan tingkat korupsinya yaitu seluruh lembaga dalam jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) dengan jumlah 264 kasus korupsi. Di ikuti oleh kelembagaan dalam naungan Pemerintah kota (pemkot) dengan jumlah 56 kasus, serta seluruh lembaga dalam jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) dengan jumlah 23 kasus.
- Tinggi jumlah kasus yang terjadi pada lingkungan Pemkab ternyata membawa pengaruh pada tingginya potensi kerugian negara yang ditimbulkan hingga mencapai Rp.657,7 miliar. Kemudian diikuti oleh lembaga BUMN, meskipun jumlah kasus yang terjadi dilingkungan ini lebih kecil dibanding di Pemkot dan Pemprov, namun ternyata potensi kerugian negara yang muncul di BUMN (atau kedua setelah Pemkab) yaitu mencapai Rp. 249,4 miliar. Baru kemudian diikuti oleh kasus korupsi di Pemkot yang mencapai Rp. 88,1 miliar rupiah.
- Fenomena tingginya korupsi di level kabupaten/ kota yang terus berulang ini menunjukkan sulitnya menyandarkan pemberantasan korupsi kepada kepala daerah. Apalagi para kepala daerah seringkali telah tersandera oleh proses pilkada yang diwarnai politik uang ataupun donatur-donatur gelap sebagai bagian dari investasi politik.

17



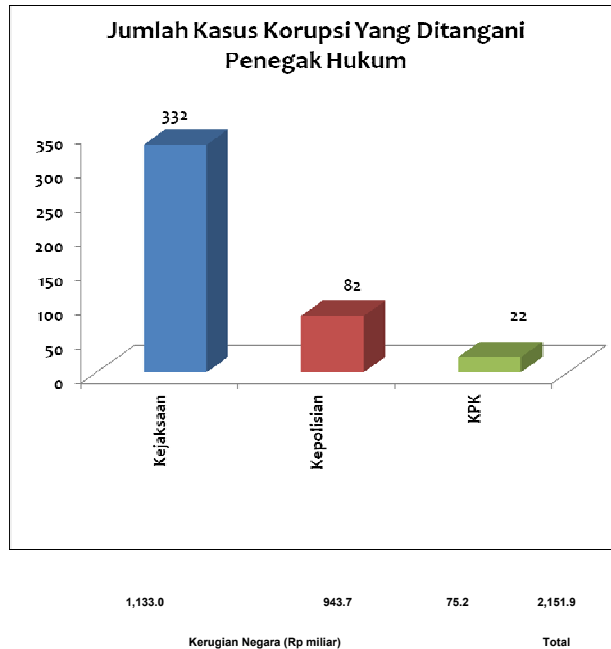
Dok-ICW2012

18

Korupsi berdasarkan wilayah terjadi

1. Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2011 ini menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi banyak bermunculan di seluruh provinsi di Indonesia, namun hanya 10 provinsi yang paling dominan jumlah kasus korupsinya.
2. Dari 10 provinsi tersebut, tiga provinsi yang paling tinggi tingkat korupsinya yaitu provinsi Jawa Timur dengan jumlah 33 kasus. Diikuti provinsi NTT dengan 32 kasus dan provinsi NAD dengan 31 kasus
3. Namun jika di jumlah kasus yang muncul dikaitkan dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan, ternyata 21 kasus korupsi yang muncul di wilayah pusat memiliki potensi kerugian negara terbesar dibanding wilayah lain, yaitu sebesar Rp. 535,7 miliar. Setelah itu diikuti kasus di provinsi lampung dengan Rp. 158,2 miliar dan Provinsi Sumatera Barat dengan potensi kerugian negara Rp. 144,3 miliar

19



Dok-ICW2012

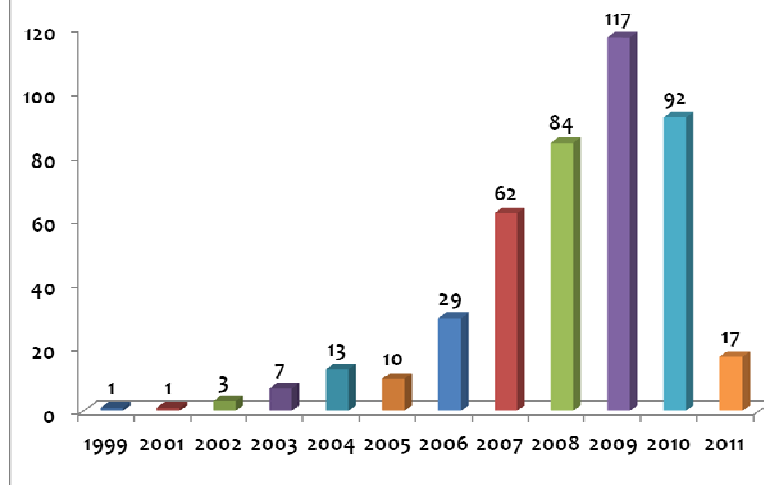
20

Jumlah kasus korupsi yang ditangani APH

1. Ditinjau dari sisi kuantitas kasus, kinerja penegak hukum selama tahun 2011 relatif cukup baik karena telah mampu memproses setidaknya 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1053 orang. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibanding tahun sebelumnya namun jumlah kasus korupsi tetap masih sangat signifikan.
2. Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2011, Kejaksaan menjadi institusi yang paling banyak menangani kasus korupsi dengan jumlah 332 kasus. Diikuti dengan Kepolisian yang menangani sebanyak 82 kasus korupsi dan KPK yang menangani 22 kasus korupsi selama tahun 2011.
3. Banyaknya jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan berkontribusi pada tinggi potensi kerugian negara yang akan ditangani yaitu mencapai Rp. 1,133 triliun. Diikuti Kepolisian mencapai Rp. 943,7 miliar serta KPK yang mencapai Rp. 75,2 miliar.

21

Jumlah Kasus Korupsi Menurut Tahun Terjadi



Jumlah kasus korupsi berdasarkan tahun terjadinya

- Secara kuantitatif penegakan hukum kasus korupsi Selama tahun 2011, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan relatif baik karena kasus yang ditangani cukup banyak.
- Besarnya jumlah tersebut harus dilihat lebih detail khususnya terkait waktu terjadinya kasus korupsi pertama kali. Ternyata jika dianalisa sejak awal terjadinya dugaan praktek korupsi diketahui kasus-kasus yang disidik tahun 2011 didominasi kasus-kasus lawas.
- Secara spesifik kasus yang paling banyak ditangani APH adalah kasus di tahun 2009 (117 kasus), tahun 2010 (92 kasus) dan tahun 2008 (82 kasus). Untuk kasus yang terjadi di tahun 2011 dan langsung ditangani atau ditetapkan ditahun yang sama hanya 17 kasus.
- Kondisi ini tentu harus dilihat perkembangannya lebih detail 1-2 tahun kedepan mengingat dua institusi tersebut memiliki kewenangan SP3 dan SKp2.

23

Rekomendasi

- Pertama, soal mengevaluasi dan mendorong efektifitas reformasi birokrasi mengingat program renumerasi sudah diterapkan, khususnya di lembaga pemerintah pusat, akan tetapi kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri tidak kunjung surut.
- Kedua, APH harus memulai menyusun design, strategi dan prioritas utama dalam penanganan kasus korupsi khususnya untuk menangani korupsi di sektor terbesar penerimaan Negara seperti pajak, migas dan menegakkan hukum pada lembaga Negara yang terbesar belanja keuangannya.
- Ketiga, APH harus mulai menggunakan berbagai macam pasal dalam UU Tipikor yang beragam untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi. Jika APH hanya fokus pada penggunaan pasal 2 dan 3 yang berhubungan erat dengan praktek pengadaan barang/jasa, maka semestinya kasus korupsi yang ditangani bisa lebih beragam jika berbagai macam pasal korupsi dalam UU Tipikor digunakan secara efektif, termasuk pasal suap. Khusus pasal suap, APH harus mengembangkan strategi penegakan hukumnya untuk dapat membongkar kasus-kasus suap secara lebih massif.

24

Rekomendasi

- Keempat, penggunaan dana bansos dan hibah untuk kepentingan pemenangan pilkada oleh kandidat yang berposisi incumbent harus segera dihentikan. Oleh karena itu, Kemendagri harus menggunakan wewenang dan otoritasnya untuk melarang penggunaan dana hibah/bansos menjelang pilkada. Moratorium penggunaan dana bansos/hibah menjelang Pilkada akan membuat dana APBD lebih efektif dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan daerah ketimbang sebagai alat politik bagi *incumbent* untuk memobilisasi suara pemilih. APH juga harus menempatkan penanganan kasus korupsi dana bansos/hibah secara lebih serius, terutama pada konteks kesegeraan mengingat praktek penggunaan dana bansos/hibah untuk kepentingan pilkada merupakan praktek yang bukan hanya melanggar hukum (korupsi), akan tetapi telah membusukkan proses demokrasi procedural.
- Kelima, APH sudah harus mulai transparan dalam penanganan kasus korupsi, paling tidak mempublikasikan secara detail berbagai macam kasus korupsi yang telah ditangani sehingga tidak dipersepsikan sebagai klaim belaka. Seperti kita ketahui, hampir setiap tahun, APH, khususnya Kejagung dan Mabes Polri selalu merilis kinerja aparat mereka dalam menangani korupsi, akan tetapi data-data yang mereka sampaikan sulit sekali diverifikasi karena tidak disampaikan secara detail dan lengkap.

25

Terimakasih

Tim Penyusun :

1. Adnan Topan Husodo
2. Agus Sunaryanto
3. Farodlilah Muqoddam
4. Febri Hendri
5. Lais Abid
6. Tama Satrya Langkun



26